

HAK EKSEKUTORIAL BAGI KREDITUR DALAM PELELANGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR

Muhammad Fadhil Bagaskara
1810611225

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pelaksanaannya mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut membatasi pelaksanaan eksekusi sepihak oleh kreditur dan mensyaratkan permohonan ke pengadilan, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam praktik pembiayaan fidusia, khususnya terkait efektivitas pemulihan hak kreditur atas objek jaminan. bertujuan untuk menganalisis hak eksekutorial bagi kreditur dalam pelelangan jaminan fidusia atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, serta mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dalam menjalankan hak tersebut. Metode penelitian yang diambil adalah pendekatan yuridis normatif, dengan dukungan data empiris berupa studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PN Pti dan wawancara dengan praktisi pembiayaan serta ahli hukum. Hasil menunjukkan bahwa secara normatif kreditur tetap memiliki hak eksekutorial, namun keharusan melalui proses peradilan telah menimbulkan keterlambatan, peningkatan biaya, dan penurunan nilai objek jaminan seperti kendaraan bermotor. Perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat formal dan belum memberikan jaminan pemulihan kerugian secara menyeluruh, terutama ketika hasil lelang tidak mencukupi untuk menutupi sisa kewajiban debitur. Saran dari penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan hukum dalam pembiayaan fidusia. Reformulasi tersebut mencakup penyederhanaan proses eksekusi melalui mekanisme cepat dan efisien, penguatan sistem agunan tambahan, serta penerapan asuransi fidusia dan skema kompensasi terhadap kerugian kreditur akibat ketidaktercapaian nilai lelang. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dapat menjamin tidak hanya legitimasi prosedural, tetapi juga kepastian pemulihan secara substansial.

Kata Kunci: Hak Eksekutorial, Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Eksekusi, Lelang.

Executorial Rights of Creditors in the Auction of Fiduciary Collateral Due to Debtor's Default

Muhammad Fadhil Bagaskara
1810611225

Abstract

This research is grounded in the reality that, although the Fiduciary Security Certificate legally possesses executorial power as stipulated in Article 15 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, its implementation has undergone significant changes following the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The ruling restricts the creditor's unilateral execution rights and requires court approval, thereby presenting new challenges in fiduciary financing practices, particularly in relation to the effectiveness of creditors' recovery rights over secured objects. The study aims to analyze the creditor's executorial rights in the auction of fiduciary collateral resulting from the debtor's default (*wanprestasi*), and to evaluate the legal protection available to creditors in exercising such rights. The research adopts a normative juridical approach supported by empirical data, including a case study of the District Court Decision of Pati Number 04/Pdt.G.S/2021/PN Pti and interviews with financing practitioners and legal experts. The findings reveal that, normatively, creditors still retain executorial rights; however, the obligation to proceed through judicial mechanisms has led to delays, increased costs, and a decline in the value of the collateral object, particularly in the case of motor vehicles. The existing legal protections remain largely formal in nature and do not ensure full recovery of losses, especially when auction proceeds fall short of covering the debtor's outstanding obligations. This study recommends a reformulation of legal policy in fiduciary financing. Such reformulation should include the simplification of the execution process through a more expedient and efficient mechanism, the enhancement of additional collateral systems, and the application of fiduciary insurance and compensation schemes to cover creditor losses resulting from insufficient auction outcomes. Accordingly, legal protection for creditors must not only ensure procedural legitimacy but also guarantee substantive recovery certainty.

Keywords: Executorial Rights, Fiduciary Security, Default, Legal Protection, Execution, Auction.